

Peran Militer dalam Konflik Freeport versus Amungme : Dwifungsi Militer Orde Baru di Papua

Muridan S. Widjaja
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Militer dan Orde Baru

Diskusi tentang militer Indonesia pada era Orde Baru adalah diskusi tentang “partai politik bersenjata”. Pada masa itu militer, atau biasa disebut ABRI, dapat dikatakan sebagai institusi politik yang paling dominan. Sepanjang usia Orde Baru, ABRI lebih menonjol dan piawai dalam ‘operasi politik’ dan lebih memunculkan, menurut Harold Crouch, “jendral-jendral politik”. Pangkal dari domonasi politik itu tidak lain adalah *dwifungsi* ABRI yang menempatkan angkatan darat sebagai pelaku utama. Pada masanya dwifungsi ABRI adalah tabu atau porno. Ia harus selalu didukung. Jika ingin mengkritik atau menentangnya, ia mesti ditopang dalam fungsi-fungsi bahasa yang konatif eufemistis. Hanya sekelompok aktivis mahasiswa radikal yang melawannya secara terbuka. Itu pun baru muncul pada 1990-

an dan baru efektif pada sesaat sebelum kejatuhan diktator Soeharto pada 1998.

Konstruksi sosial “dwiungsi ABRI” berangkat dari citra diri sebagai “pahlawan” dalam perang kemerdekaan 1945, yang menurut Harold Crouch¹ membuat AD merasa bahwa “suara mereka harus didengar”, tetapi lebih dari itu, suatu kekuasaan politik *omnipresent*. Diawali ketika berlaku undang-undang keadaan perang 1957, pidato Nasution tentang “Jalan Tengah” pada 1958², AD mulai mengambil porsi dalam kabinet, parlemen, dan administrasi. Peran politik ini semakin dimapankan melalui seminar AD II:

“Angkatan Darat yang dilahirkan di tengah kancan revolusi tidak pernah merupakan alat mati bagi pemerintah yang hanya sibuk dengan urusan semata-mata Angkatan Darat, sebagai pejuang kemerdekaan, tidak dapat bersikap netral terhadap haluan kebijakan negara, corak pemerintahan, dan keamanan negara yang berdasarkan Pancasila. Angkatan Darat tidak hanya mempunyai tugas kemiliteran saja, tetapi terjalin dengan segala kehidupan masyarakat”.

Dalam paradigma politik Orde Baru AD memberi kedudukan istimewa kepada dirinya sendiri dengan label sansekerta Dwi Dharma yang artinya “kewajiban, tugas hidup, atau kebajikan ganda”³. Dari diksinya, pada satu sisi menampakkan narsisme AD, dan legitimasi bagi kepentingan AD atas kekuasaan politik pada sisi lainnya. Dari perspektif narsistis itu pula muncul mistifikasi diri dan ideologisasi bahwa ABRI adalah “prajurit pejuang dan pejuang prajurit”. Tidak cukup dengan itu, AD menyebut dirinya sendiri sebagai “stabilisator dan dinamisator”⁴.

Selain *self image* sebagai “pahlawan”, AD memandang bahwa kekuatan sipil pada masa demokrasi liberal dianggap mementingkan “sifat kedaerahan yang sempit, semangat persatuan dikalahkan oleh nafsu golongan”. Di bawah kendali politisi sipil, “pemerintahan mengalami jatuh bangun, tidak ada kestabilan politik dan stabilitas ekonomi, sehingga pembangunan terbengkalai”. Selain itu, kata Soeharto, perbedaan yang tidak terkendali menimbulkan pemberontakan-pemberontakan, dan memakan banyak korban⁵. Argumen ini menjadi dasar bagi AD untuk meminggirkan kekuatan-kekuatan politik sipil, baik partai-partai politik maupun organisasi massa lainnya. Fusi partai-partai politik pada 1970-an, yang kemudian diikuti dengan politisasi birokrasi (KORPRI dan doktrin *monoloyalitas*),⁶

¹. Harold Crouch, 1999, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hal. 390.

². M. Najib Azca, 1999, *Hegemoni Tentara*, Jakarta, LKIS, hal. 88

³. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 210

⁴. *Tempo*, 19 Agustus 1978, hal. 7. Lihat juga Crouch, op.cit, hal. 308

⁵. Amanat Kenegaraan 1969, hal. 133.

⁶. Peraturan Pemerintah No. 6/1970 dan Keppres No. 82/1971. Lihat Indria Samego dkk., 1997, *Politisasi Birokrasi: Implikasi Kebijakan Monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PPW LIPI, hal. 2-3.

dan penertiban berbagai organisasi massa, seperti HKTI, KNPI, dan lain-lain, yang kemudian juga disusul dengan Normalisasi Kehidupan Kampus pada 1978 adalah sejalan dengan strategi Orde Baru dan tidak lain, merupakan desain AD⁷.

Diskusi tentang AD pada era Orde Baru adalah berbicara tentang Orde Baru itu sendiri. AD adalah Orde Baru, dan Orde Baru itu adalah AD. Golkar adalah partai politik pemerintah yang dibidani sebagian besar oleh AD—tentunya dengan peran sekedarnya dari kalangan sipil. Perhatikan pula organisasi korporatis pendukung rejim Orde Baru mulai dari Kosgoro, AMPI, FKPPi, dan lain-lain, selalu terkait baik secara institusi ataupun secara kekerabatan dengan AD. Perhaikan pula struktur birokratis dan pemerintahan Orde Baru, mulai dari presiden, menteri, hingga camat, sebagian besar terkait dengan institusi AD. Belum lagi “operasi” politik oleh panglima ABRI, panglima daerah militer, komandan rayon militer, hingga bintang pembina desa yang jangkauannya melebihi daripada apa yang bisa dilakukan oleh partai-partai politik resmi produk kebiri Orde Baru seperti Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Persatuan Pembangunan.

AD tidak hanya dominan di arena politik, tetapi juga dalam dunia bisnis. Menurut hasil penelitian LIPI, pada masa revolusi dan Orde Lama, alasan keterlibatan AD dalam bisnis disebabkan kekurangan anggaran untuk operasi militer dan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Pada era Orde Baru, alasannya untuk membantu pensiunan. Tetapi kenyataannya, perwira-perwira AD yang aktif pun duduk dalam dewan komisaris di perusahaan-perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN)⁸. Selama 30 tahun lebih Orde Baru berkuasa AD telah mengembangkan jaringan bisnis yang sangat besar di berbagai bidang seperti transportasi, kehutanan, perbankan, perhotelan, penerbangan, perkapalan, dan lain-lain.⁹ Misalnya Yayasan Kartika Eka Paksi milik AD, yayasan ini memiliki 27 perusahaan besar. Daftar ini bias diperpanjang dengan bermacam perusahaan yang dikuasai oleh Induk Koperasi AD, Primer Koperasi AD, dan lain-lain.¹⁰

Gambaran yang seperti di ataslah yang selama ini menjadi perhatian kalangan ahli politik spesialis militer. Berikut ini saya mengajak Anda untuk masuk dalam kasus Freeport-Amungme. Kasus ini menarik karena tiga hal, yakni, pertama, intensitas peran AD dalam proses-proses awal dan lanjutannya; kedua, dimensi kesukubangsaan dalam taktik-taktik yang dikembangkan oleh AD, pemerintah, dan Freeport, maupun dari pihak masyarakat sendiri; ketiga, daya

tahan dan daya lawan pranata local (LEMASA) dalam menghadapi koalisi Freeport-birokrasi-AD. Sehubungan dengan tema tersebut, saya mengambil suatu rangkaian kasus yang melibatkan Ad, pemerintah, Freeport, dan suku-suku bangsa yang bermukim di Timika dan sekitarnya, sebagai topik bahasan makalah ini yakni: kerusuhan Maret 1996, pemberian dana satu persen, dan implikasi lebih lanjut dari perkembangan kasus itu.

Studi tentang militer pada era Orde Baru sudah banyak dilakukan. Untuk menyebut beberapa diantaranya, terdapat Ian Mac Farling yang menulis *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces: Military Politics in Indonesia*, 1996. Lalu seorang mantan dosen Fisip UI Harold Crouch menulis *Militer dan Politik di Indonesia* pada 1999. Dari Indonesia, Indria Samego dan kawan-kawan (dari LIPI) menulis tiga buku hasil penelitian, yaitu: *Bila ABRI Menghendaki*, 1998; *Bila ABRI Berbisnis*, 1999; dan *Bila ABRI Mendamba Mitra*, 2000. Yang juga perlu dicatat adalah karya M. Nadjib Azca yang berjudul *Hegemoni Tentara* yang terbit pada 1999. Pada umumnya studi-studi yang dilakukan memfokuskan perhatiannya pada problem-problem dwifungsi pada tingkat makro dan nasional, baik itu aspek histories, politik, ekonomi, maupun ideologi.

Makalah ini tidak berpretensi memberikan sumbangan baru pada kekayaan analisis teoritis yang telah dibangun oleh para ahli politik spesialis militer dan Orde Baru yang telah melakukan penelitian bertahun-tahun. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana dwi fungsi militer itu menampakkan wajahnya di daerah “jauh” dimana biasanya para ilmuwan politik tidak mempunyai cukup waktu, serta lebih senang berada di “pusat”. Masalah militer tidak harus menjadi “wilayah” ilmuwan politik, tetapi ia bias atau semestinya menjadi soal dan perhatian para antropolog, Mengapa? Tangan-tangan kekuasaan militer pada era Orde Baru sedemikian menggurita hingga ke pedalaman dan memiliki dampak serius dalam berbagai hal baik yang terkait dengan budaya masyarakat lokal, daya hidup pranata lokal, ekonomi lokal, bahkan kecenderungan disintegrasi bangsa yang sedang mengancam negara-negara kita. Papua, Aceh, Timor-Timur, dan Maluku adalah sebagian contoh prestasi militer.

Makalah ini membahas, pertama, tindakan dan peristiwa yang menunjukkan peran-peran kalangan militer dan kelompok korporatis yang “dibinanya” dengan memanfaatkan kesukubangsaan, yang kemudian secara tidak langsung memaksa birokrasi sipil – Pemerintah Pusat dan Daerah – serta Freeport untuk terlibat dalam rekayasa itu. Kedua, kepentingan politik dan ekonomi di balik isu-isu politik yang terkait dengan kesukubangsaan. Ketiga, akibat politik kesukubangsaan ini bagi hubungan antar etnis dan kepemimpinan masyarakat setempat.

Makalah ini dibuat berdasarkan catatan lapangan tambahan yang saya buat selama melakukan penelitian tentang orang Kamoro pada 1996 – 1997, dan Amungme 1997 – 1998 di bawah bendera Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo-

⁷ Arbi Sanit, 1999, “Gerakan Mahasiswa 1970 – 1973: Pecahnya Bulan Madu Politik,” Dalam Muridan S. Widjojo dkk., *Penakluk Rejim Orde Baru*, Jakarta, Sinar Harapan, hal.59

⁸ Indria Samego dkk., *Bila ABRI Berbisnis*, Jakarta, Mizan, hal. 67

⁹ *Ibid.*, hal. 67

¹⁰ Angkatan Laut, Polri, dan Angkatan Udara juga menguasai sejumlah usaha namun jumlahnya jauh lebih kecil dengan bisnis Angkatan Darat. *Ibid.*, hal. 88-96

nesia (LIPI). Total masa tinggal saya di Timika, Tembagapura dan sekitarnya dalam kurun tiga tahun berlangsung kurang lebih sembilan bulan. Data juga berasal dari catatan yang saya kumpulkan dalam konteks pekerjaan investigasi Tim Audit Sosial bentukannya Labat Anderson – perusahaan konsultan dari Amerika Serikat – dalam kurun waktu 1996–1998.

Konflik antar suku bangsa Amungme melawan Freeport yang berlangsung sejak 1967 dipandang oleh kalangan pemimpin Amungme, aktivis NGO (*Non Government Organization*) lokal maupun nasional sebagai konflik yang bersumber pada ketidakadilan sosial ekonomi, perusakan lingkungan, pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan penindasan terhadap eksistensi Amungme sebagai entitas. Sedangkan bagi pemerintah pusat dan militer, konflik itu diyakini terkait dengan aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) – yang disebut dengan Gerakan Pengacau Keamanan – dan upaya sekelompok NGO untuk merongrong kekuasaan pemerintah yang sah dan menghambat pembangunan¹¹. Perbedaan cara pandang itu tidak semata-mata hasil perbedaan persepsi, tetapi juga menegaskan perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi pada masing-masing pihak.

Dalam sistem politik Orde Baru yang birokratik otoriter secara politik dan tamak secara ekonomi, perusahaan multinasional semacam Freeport lebih memilih berkompromi dengan para penguasanya yang lebih menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha raksasa mereka. Kepentingannya jelas, yakni keberhasilan usaha pertambangannya. Elit-elit Orde Baru di pusat – baik dari kalangan birokrasi sipil maupun militer – pun jelas kepentingan politik ekonominya. Freeport adalah sumber kekayaan yang sangat besar. Pertemuan kepentingan ini membuat dua pihak ini “berkoalisi” dalam menghadapi kritik dan perlawanan Amungme sebagai pemilik hak ulayat tanah – yang didukung aktivis-aktivis NGO lokal dan nasional. Seiring dengan sejarah perlawanan Amungme yang terus mengeras berkelanjutan sejak 1967, keterlibatan militer sebagai garda depan penjaga rejim politik dan modal pun terus meningkat.

Keterlibatan militer

Pada 10-12 Maret 1996 kota tambang Tembagapura dan Timika diporak-porandakan oleh ribuan warga kecamatan Timika Timur yang membuat kerusuhan. Sasaran amuk adalah properti Freeport. Kerusuhan ini sebagian besar melibatkan suku-suku bangsa pegunungan Papua non-Amungme yang bermukim di Timika, Tembagapura, dan sekitarnya, yakni Moni, Dani, Mee, Damal, dan Nduga. Picu kerusuhan adalah ‘kecelakaan’ yang menimpa Welinus (Bagus) Kogoya (seorang warga Dani) akibat tertabrak oleh salah satu mobil

Freeport.¹²

Mengacu pada sejarah perlawanan Amungme terhadap Freeport, publik langsung menilai bahwa kerusuhan itu merupakan ekspresi kemarahan masyarakat akibat pelanggaran hak ulayat, HAM, kesenjangan sosial ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan yang dialami penduduk asli. Kalangan Gereja Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang bermukim di luar Timika langsung menunjuk masalah-masalah diatas sebagai sebab utama. Begitu pula dengan NGO semacam WALHI, INFID, ELSAM, dan LPPS, langsung membuat pernyataan yang berinti sama dengan pokok-pokok di atas.

Bagi aktivitas dan petugas Gereja lokal serta pimpinan Freeport yang memiliki mata dan telinga di Timika kerusuhan itu menimbulkan pertanyaan. Mereka bertanya-tanya, mengapa aktivis LEMASA yang tidak berada di depan memimpin kerusuhan ini. Bukankah selama ini LEMASA gigih memperjuangkan hak-haknya? Bahkan pemimpin LEMASA Tom Beanal sejak awal menolak aksi kekerasan semacam ini. Ketika kerusuhan terjadi, perjalanan massa dari Tembagapura ke Timika sejauh 70 kilometer, tidak dihalangi oleh aparat polisi maupun militer. Di tengah massa perusuh terdapat sejumlah anggota Kopassus ikut memberi aba-aba kepada massa.¹³ Setelah dicermati, sebagian pimpinan kerusuhan adalah intel pembantu Kopassus. *Vice President* Freeport Paul Murphy dalam satu kesempatan menyebut itu sebagai *handy talky riot*. Tetapi kesaksian penting semacam ini pada saat itu tidak muncul ke permukaan. Publik nasional dan internasional terjebak dalam scenario kesan bahwa kerusuhan Maret 1996 adalah manifestasi representasi Freeport versus Amungme.

“Gejolak” itu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara pemimpin Freeport McMoran dari New Orleans Amerika Serikat James Bob Moffet, Gubernur Irian Jaya, Danjen Kopassus, dan Panglima ABRI, dengan tokoh-tokoh Amungme, di Hotel Sheraton Timika pada 14 Maret 1996. Pertemuan ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa pimpinan kerusuhan tidak ditangkap? Mengapa yang berdialog dengan elit kekuasaan justru tokoh-tokoh Amungme yang tidak terkait dengan kerusuhan? Dalam proses itu pihak militer, terutama Kopassus, sangat aktif. Suasana pertemuan itu juga dikesankan terbuka. Yosefa Alomang dan Tom Beanal – yang selama ini dipinggirkan dalam proses sosial politik di Timika – diberikan kesempatan berbicara. Hanya saja ketika Direktur Eksekutif LEMASA Sersan Andreas Anggaibak menyatakan tuntutan agar Freeport ditutup, ia langsung dibawa ke

11. Wawancara dengan seorang perwira menengah Kodam VIII Trikora, April 1996

12. Versi NGO mengatakan bahwa pada 7 Maret 1996 Bagus Kogoya dianiaya oleh satpam Freeport dan dibuang ke sungai. Lalu seorang bule menemukannya dan membawanya ke rumah sakit di Tembagapura. Lihat selebaran “things to be verified of the riot at Tembagapura, Kuala Kencana, and Timika on 10-12 March 1996” yang dibuat oleh WALHI, ELSAM, LPPS, dan INFID.

13. Kesaksian Pastor Paroki Tiga Raja Timika, Nato Gobai, Agustus 1997.

belakang dan mengaku ditodong senjata oleh Danjen Kopassus Prabowo¹⁴.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh Amungme itu hendak dikesankan bahwa para pimpinan amungme terlibat kerusuhan. Sedangkan pimpinan kerusuhan sebenarnya yang dari suku-suku bangsa non-Amungme tidak dihadirkan. Tetapi tidak lama kemudian, sebagian besar pimpinan kerusuhan justru diboyong oleh Mayjen Prabowo Subianto ke Jakarta. Pada satu sisi Prabowo membangun citra seakan-akan Kopassus tanggap pada aspirasi rakyat setempat. Meskipun oleh pihak pemerintah dan Freeport dikatakan bahwa pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan kerusuhan, publik lokal dan nasional mempercayainya.

Pertemuan Sheraton itu diakhiri dengan sejumlah tuntutan. Sebulan kemudian Freeport “menjawab” tuntutan itu dengan memberikan dana satu persen pendapatan kotor Freeport untuk “masyarakat asli” di Timika. Secara substansi, jawaban itu tidak ada hubungannya dengan tuntutan LEMASA. Dana tersebut dibagikan kepada yayasan tujuh suku yang ada di Timika – tidak hanya kepada Amungme dan Kamoro yang merupakan pemilik hak ulayat. Pola pembagian dana – yang jumlahnya mencapai 17,5 milyar – adalah masing-masing suku; Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Mee, Moni, dan Nduga, menerima Rp 500 juta. Sedangkan sisanya Rp 14 milyar akan dikelola oleh pemerintah daerah melalui proyek Pengembangan Wilayah Timika secara Terpadu (PWT2)¹⁵. Selanjutnya yang terjadi adalah represi terhadap setiap kemungkinan kerusuhan, dan terutama “pemaksaan” agar tujuh suku yang dimaksud menerima dana dan mendukung PWT2.

Di samping LEMASA dan kelompok suku-suku bangsa Papua yang lain, beberapa NGO nasional juga menolak

pemecahan masalah dengan model satu persen dan menuntut dialog terbuka yang membahas masalah dasar dan sumber konflik antara Freeport dengan Amungme¹⁶. Namun tidak ada responsi dari Freeport dan pemerintah daerah. Setiap pertemuan yang dilakukan hanya bertujuan agar masyarakat menerima dana tersebut. Taktik model satu persen memang tidak dimaksudkan untuk menjawab tuntutan dan atau mengurangi sakit hati kolektif yang selama tiga puluh tahun lebih berakumulasi di kalangan Amungme. Oleh karena itu responsi pimpinan LEMASA yang menghadiri pertemuan Sheraton tidaklah tepat. Dengan begitu, mereka masuk dalam skenario militer.

Pranata lokal: LEMASA dan LEMASKO

Pengalaman konflik dengan Freeport, militer, dan pemerintah selama puluhan tahun membuat masyarakat lokal mulai merasakan perlunya suatu lembaga yang mewakili dan berbicara untuk kepentingan mereka. Yayasan Lorentz sempat didirikan oleh kaum terdidik Amungme berdiri pada sekitar 1990-an untuk isu-isu lingkungan hidup. Lalu menyusul LEMASA (sekitar 1994) yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat adat Amungme. Di dalam LEMASA dan Lorentz inilah bersatu tokoh-tokoh adat, kepala suku, dan intelektual lokal Amungme.

Protes dan kritik yang seringkali frontal terhadap Freeport, pemda, dan militer banyak muncul dari

YAYASAN SATU PERSEN		
1	Y. Amungkal	Suku Amungme
2	Y. Kamoro	Suku Kamoro
3	Y. Pengemb. Masy. Lani	Suku Dani
4	Y. Pengemb. Pendidk. Sos. Ekonomi Budaya Nogei	Suku Ekagi
5	Y. Pengemb. Masy. Nduga	Suku Nduga
6	Yayasan AMEDDK	Suku Moni
7	Y. Pengemb. Masy. Damal	Suku Damal

lembaga tersebut. Dari situ pula muncul nama-nama pemimpin local seperti Tom Beanal (“Kepala Suku Besar Amungme,” Torei Negel LEMASA, dan tokoh utama dalam Kongres Rakyat Papua 2000), Victor Beanal (kepala suku), Yopie Kilangin (tokoh muda putra Moses Kilangin), Yohannes Pinimet (Direktur Eksekutif) dan Andreas Anggaibak (bintara polisi). Hingga kerusuhan Maret 1996 pemimpin-pemimpin yang cukup berpengaruh itu sangat kompak. Program utama yang dikedepankan kelompok ini adalah masalah hak ulayat,

14. Pengakuan Andreas Anggabaik di Timika, Juli 1997. Posisi Andreas sangat lemah karena ia seorang bintang Polri yang pernah disinyalir terlibat OPM. Dalam perkembangan selanjutnya terbukti bahwa Andreas kemudian berbalik posisi dengan menentang para aktivis LEMASA di mana dia sebelumnya menjabat direktur eksekutif.

15. Dana 1% seharusnya berjumlah Rp 34,5 milyar pertahun, untuk 1996 baru terhitung setengah tahun. Jadi yang diserahkan kepada masyarakat (baca: PWT2) hanya Rp 17,5 milyar.

16. Lihat “Statement of Concern: Timika riots should be addressed at its underlying causes” ditandatangani oleh Zulkarnaen, A.H. Garuda Nusantara, Zoemrotin, dan Eko Poernomo.

hak asasi, lingkungan hidup, dan keadilan bagi penduduk asli.

Di kalangan suku bangsa Kamoro, sebelum kerusuhan Maret, pernah terdengar nama Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) namun belum sempat terbentuk. Setelah ada rencana pemberian dana satu persen, LEMASKO segera didirikan. Lembaga ini dibentuk oleh sejumlah pegawai negeri (sebagian besar guru) orang Kamoro dan dibantu oleh sejumlah anggota Kopassus. Kontras dengan LEMASA, lembaga ini didominasi oleh guru. Peran kepala suku atau tokoh adat sangat minimal. Program ini didirikan untuk memanfaatkan dana satu persen dan bukan untuk perjuangan aspirasi orang Kamoro.

Sejak bergulirnya dana satu persen, dan anjuran pemda kepada masyarakat untuk mendirikan yayasan atas nama suku bangsa masing-masing, terjadi perubahan dalam dinamika kelembagaan dan kepemimpinan dalam internal kelompok suku bangsa dan perubahan dalam hubungan antar suku bangsa. Perubahan ini ditandai pertama oleh besarnya campur tangan aparat pemda dan militer terhadap mekanisme kepemimpinan kelompok suku bangsa; dan kedua oleh tersingkirnya pemimpin-pemimpin yang selama ini kritis dan mendapatkan dukungan dari masyarakatnya.

Penghancuran LEMASA

Penghancuran LEMASA dimulai dengan kooptasi Sersan Polisi Andreas Anggabaik yang menjabat direktur eksekutif LEMASA. Militer berhasil membuat Anggabaik membuat pernyataan sepihak bahwa LEMASA bersedia menerima dana Rp 500 juta dan tidak akan membuat tuntutan apapun terhadap Freeport. Akibatnya pemimpin LEMASA status uang tersebut tidak jelas dan mengaburkan sumber persoalan yang selama ini timbul antara Amungme dengan Freeport¹⁷. Dari sini taktik pecah-belah LEMASA mulai terlihat efektif.

Anggabaik keluar dari LEMASA dan membentuk Yayasan Amungkal. Yayasan ini mewakili suku bangsa Amungme menerima pembagian dana satu persen. Yayasan ini secara eksplisit mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan militer serta dipercaya menerima dana dari Freeport. Jatah Rp 500 juta dari Freeport untuk Amungme akhirnya diterima oleh yayasan Amungkal. LEMASA terpecah. Kantornya pindah dari rumah Anggabaik ke sekretariat Yayasan Lorentz. Tom Beanal, dan kawan-kawan, yang berusaha konsisten mempersoalkan hak tanah ulayat dan pelanggaran hak asasi manusia melalui dialog segitiga yang setara dan terbuka, tetap berada di luar sama seperti sebelum adanya kerusuhan dan dana satu persen. Sementara

yayasan Amungkal sibuk membuat proyek dan membagi-bagi uang, LEMASA terus menerus diawasi oleh anggota-anggota intel yang mondar-mandir di sekitra sekretariat.

Dukungan masyarakat terhadap LEMASA masih besar. Amungkal sendiri tampak mengalami kesulitan mencari pengurus. Di sana terdapat Anton Kum yang sebenarnya mantan guru agama dan masih tinggal di Akimuga (dari Timika 2 hari perjalanan dengan perahu motor). Selain itu Markus Uamang adalah pegawai negeri pemda Fak-fak yang tinggalnya jauh dari Timika. Ini menunjukkan bahwa Amungkal kesulitan mencari pengurus. Sebagian besar tokoh berpengaruh Amungme masih mendukung LEMASA. Saya juga menemukan dua pengurus Amungkal yang ternyata bekas aktivis OPM. Gerardus Timang, yang menjabat sebagai sekretaris pernah dipenjara di Kalisosok Surabaya selama 7 tahun karena didakwa terlibat OPM. Sedangkan Leriur Katagame adalah anak Damianus Katagame – tokoh OPM yang baru pulang dari Papua Nugini. Kenyataan ini menarik karena orang-orang bekas OPM yang selama ini dimusuhi oleh militer dan Pemerintah ternyata dimanfaatkan sebagai pengurus yayasan yang seratus persen diakui dan dinyatakan sah oleh pemerintah daerah dan militer. Apakah pihak pemda dan militer mengetahui hal ini? Jika tahu, motivasi apa yang berada dibalik penempatan kedua orang bekas aktivis OPM tersebut? Ataukah ini hanya karena Amungkal mengalami kesulitan mencari pengurus yayasan?.

Bila Amungkal mendapatkan legitimasi dari pemda dan militer, hal sebaiknya terjadi pada LEMASA. Selain mendapatkan pengawasan yang ketat, salah seorang pemimpin utama LEMASA, yakni Tom Beanal, menghadapi tuduhan sebagai dalang penyanderaan 13 karyawan PT Jayanti Group. Menurut pejabat Kodam Trikora terdapat bukti surat dari Tadius Yogi, pemimpin OPM yang menjadi pemimpin penyanderaan, yang menyatakan bahwa Tom Beanal lah yang memerintahkan penyanderaan itu. Dalam perspektif system politik suku-suku bangsa pegunungan tengah Papua, mustahil seorang Amungme bisa memerintahkan penyanderaan kepada pemimpin OPM yang warga suku bangsa Mee. Tradisi politik dan kepemimpinan otonom suku-suku bangsa pegunungan tidak memungkinkan hal itu terjadi. Bila benar Beanal mampu mengendalikan Yogi, ini kenyataan di luar kebiasaan. Selain itu secara histories Tom tidak pernah menunjukkan sikap mendukung perjuangan OPM. Kalangan Amungme tidak mempercayai keterlibatan Beanal dalam penyanderaan. Sebaliknya mereka bertanya-tanya, benarkah Yogi membuat surat itu? Jika benar brearti Yogi ingin mencelakakan Beanal, ini dapat menyulut kemarahan Amungme terhadap Mee.

Lain halnya dengan Fidelis Zonggonau dan AMEDKK. Yayasan ini mencuat namanya setelah kerusuhan Maret 1996. Fidelis, pimpinan yayasan ini, adalah juga pimpinan kerusuhan di Tembagapura yang kemudian menjalar ke Timika. Kelompok ini pula, bersama dengan kepala suku lainnya, datang ke Jakarta (termasuk ke LIPI). Pada awalnya ia sependapat dengan

17. Lihat surat pernyataan 27 Juni 1996 yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh utama Amungme (Victor Beanal, Barthol Magal, Tom Beanal, Lukas Amisim, Mathias Kelanangame, Benny Tsenawatme, Tuarek Natkime) dan tokoh-tokoh pegunungan suku-suku bangsa lain seperti Biru Kogoya, Cosman Waker, Isak Magai, Syarubabel Kum, Alfius Kuyangge, Habel Degey, Beny Magai, dan Junus Omabak.

LEMASA, jika Freeport benar-benar ingin memberikan satu persen ia menyarankan seharusnya uang itu diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, Pemda tidak menunjuk Fidelis untuk mewakili suku bangsa Moni dalam PWT2, melainkan kakak Fidelis, yaitu Lazarus Zonggonau yang mendirikan yayasan MEPA. Menyadari hal yang tidak menguntungkan ini, Fidelis kemudian ikut bergabung dengan kelompok penerima dana satu persen.

Taktik pecah-belah yang sama juga dialami suku-suku bangsa di pegunungan lain, yakni suku bangsa Dani, Damal, Nduga, dan Mee. Pada suku bangsa Dani misalnya pemimpin yang diakui masyarakat adalah Cosman Waker namun yang ditunjuk sebagai wakil dalam PWT2 adalah Herman Murib yang konon pernah dipenjarakan 7 tahun di Kalisosok, Surabaya karena kasus OPM. Murib bekerjasama dengan Babinsa Kwamki Lama Sersan Philipus Waker yang kemudian memimpin Yayasan Pengembangan Masyarakat Lani (milik Suku Bangsa Dani). Pada suku bangsa Damal seharusnya yang diakui representatif adalah Syarubabel Kuum tetapi yang ditunjuk oleh PWT2 adalah Benyamin Kiwak yang ternyata, menurut seorang Damal, adalah tenaga pembantu intel Kopassus. Orang Damal itu mengaku pernah dipameri kartu anggota pembantu operasi Kopassus¹⁸. Pada suku bangsa Mee yang diakui sebagai kepala suku adalah Habel Degey tetapi yang tampil kemudian adalah Mathias Gobay.

Keterlibatan intensif kalangan militer dan birokrasi local dalam pendirian yayasan baru dan yayasan tandingan, serta penentuan, serta penentuan kepala suku, tidak terjadi pada suku bangsa Kamoro. Suku bangsa ini dikenal sangat kompromistis dan tidak akan ada perlawanan dari mereka. Sepanjang sejarah konflik sosial Freeport dengan masyarakat setempat, suku bangsa ini lebih banyak berdiam diri. Semua keputusan dari Freeport, Pemda, atau militer selalu mereka terima tanpa banyak bertanya, bahkan seringkali mereka juga tetap diam meskipun tidak tahu apa yang dimaksud oleh Freeport atau Pemda. Kalangan Freeport, Pemda atau Militer menganggap suku bangsa Kamoro tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menggagalkan rekayasa.

Tokoh-tokoh desa Lamoro hanya berlomba agar pemerintah atau militer menunjuk mereka sebagai kepala suku. Dengan penunjukkan itu seseorang tiba-tiba menjadi percaya diri dan merasa berkuasa untuk mengambil keputusan. Di dua desa pernah terjadi kasus dua orang mengklaim diri sebagai kepala suku karena kedua-duanya pernah ditunjuk

oleh perwira Kopassus. Terjadilah perkelahian di antara kedua orang itu. Akhirnya sebagai kompromi, ketika ada pembagian uang untuk kepala suku terpaksa jatahnya dibagi dua.

Kepemimpinan pada suku bangsa Kamoro, yang terletak di dataran rendah dan pantai, memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda dengan suku-suku bangsa pegunungan. Pada suku bangsa Kamoro lembaga kepemimpinan secara tradisional sangat longgar dan lemah. Suku

bangsa ini sejak lama secara psikologis dan social merasa inferior dan bahkan takluk pada kekuatan luar. Pemerintah, dalam persepsi orang Kamoro, merupakan sumber kekuasaan baru yang tak terbatas tempat mereka, mendapatkan barang-barang dan uang secara tak terbatas. Oleh karenanya suku bangsa ini memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah. Setiap orang merasa diri bisa menjadi pemimpin berupaya mendapatkan legitimasi dari Pemerintah¹⁹.

Sementara itu kepemimpinan pada suku-suku bangsa pegunungan benar-benar secara tradisional dirintis dan diperoleh melalui suatu pencapaian prestasi tertentu seperti pandai berenang, beristri banyak, menguasai dan mengelola kebun yang besar, atau memiliki kekayaan babi dalam jumlah besar. Persaingan untuk menjadi pemimpin sangatlah ketat. Oleh sebab itu penunjukkan oleh pemerintah terhadap orang-orang tertentu sebagai kepala suku segera mendapatkan reaksi jika orang tersebut tidak memiliki kualitas yang mereka harapkan²⁰.

Politik kesukubangsaan

Prinsip dalam pola pembagian dana satu persen nampaknya memanfaatkan konstruksi pandangan umum

KEPALA SUKUDI TIMIKA		
Suku	Ka. Suku versi Militer & Freeport	Ka. Suku versi Masy.
Amungme	Gerardus Timang	Victor Beanal
Kamoro	C. Amareyau	M. Nawaripi
Dani	Korea Waker	Kosman Waker
Ekagi	Mathias Gobay	Abel Degey
Nduga	W. Wesareak	Karel Kwijangge
Moni	L. Zonggonau	L. Zonggonau
Damal	Benyamin Kiwak	Zerubabel Kuum

Sumber : Freeport dan Observasi Lapangan

18. Pada kunjungan April 1997 penulis juga melihat sendiri kartu tersebut.

19. Tentang Kamoro dan perubahan social ini ditulis dalam Muridan. S. Widjojo, *Kamoro dan Pembangunan*, Jakarta, LIPI, 1997.

20. Bandingkan dengan Johzua Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, 1995, LIPI-RUL, Jakarta.

bahwa masyarakat asli-lah yang berhak mendapatkan pembagian dana satu persen. Oleh karena itu diputuskan bahwa masyarakat asli yang berhak menerima dana itu adalah kelompok orang-orang yang mengaku diri sebagai Amungme, Damal, Kamoro, Dani, Nduga, Mee, dan Kamoro. Model semacam ini mempertajam perbedaan-perbedaan antar suku bangsa dan memperkuat politik identitas di antara suku-suku bangsa di Timika. Kategori suku-suku bangsa itu sendiri problematic. Kriteria-kriteria pembeda antara satu suku bangsa dengan yang lainnya-pun seringkali kabur. Pengakuan atas identitas itu menjadi beragam dan sulit untuk dibuat cerita baku dalam pembedaan itu.

Dalam menentukan criteria siapa yang berhak disebut sebagai kepala suku Dani, misalnya, kabur. Istilah "Dani" adalah konstruksi antropolog. Jika definisi antropolog digunakan maka orang Dani Balim di Wamena dan sekitarnya serta orang Dani Barat di Karubaga, Kelila, Makki, Tiom, Bokondini, dan lainnya (hampir seluruh kabupaten Jayawijaya) berhak atas dana satu persen. Itu sebabnya orang-orang Wamena, Kelila, Bokondini, berduyun-duyun datang ke Timika. Tetapi pada kenyataannya dana satu persen dikuasai oleh kelompok Sersan Philipus Waker. Perbedaan antara "Dani" dan "Nduga" pun problematic, karena terdapat tumpang tindih cirri-cirui budaya dan geografis keduanya. Pada daerah tertentu orang Dani disebut juga orang Nduga begitu pula sebaliknya. Identitas Damal dan Amungme pun secara katagoris tumpang tindih. Menurut antropolog dan peninjil yang lama di daerah Damal (Uhunduni), kebudayaan kedua suku bangsa itu sebagian besar sama. Wilayah mereka pun bersebelahan²¹.

Kategori "Kamoro" juga tidak kurang problematik. Istilah atau nama ini belum lama dipakai di kalangan masyarakat yang disebut Kamoro itu. Pater Zegwaard, Peter Coonen, dan Antropolog Belanda Jan Pouwer pun sejak lama menyebut orang Kamoro sebagai orang Mimika²². Masyarakat menyebut dirinya sebagai *mimiwake*, itupun terbatas pada penduduk di sekitar kali Mimika. Orang Nawaripi atau orang Moare tidak menyebut dirinya *mimiwake*. Akibat dana satu persen, identitas Kamoro menjadi rebutan orang-orang yang bermukim dari Keikwa(?) hingga Potowaiburu. Karena orang-orang Kamoro ini berada dalam dua wilayah kecamatan yakni Mimika Barat dan Mimika Timur. Pendeknya, pengakuan identitas sebagai anggota salah satu dari tujuh suku bangsa yang secara resmi diakui memberikan keuntungan politik dan ekonomi.

Suku-suku bangsa Papua lainnya, di luar kategori tujuh suku tersebut seperti Biak, Serui, Sentani, Ayamaru, dan

pendatang non-Irian seperti Bugis, Makasar, Buton, Jawa, dan lain-lain berusaha mendekati kelompok tujuh suku bangsa yang diberi hak. Meskipun dana satu persen belum dicairkan namun berita sudah tersebar luas. Toko-toko milik pendatang di Timika berlomba memberikan fasilitas kredit kepada orang-orang yang diakui sebagai salah satu dari warga tujuh suku bangsa. Hutang puluhan bahkan ratusan juta rupiah dialami oleh banyak toko di Timika. Orang-orang yang merasa sudah terbelit hutang ini pun semakin keras berusaha agar mendapatkan bagian yang cukup besar dari dana satu persen agar bisa melunasi hutang-hutangnya.

Destabilisasi hubungan antar suku bangsa

Di kalangan tokoh dan pemimpin lokal, serta masyarakat suku-suku bangsa pegunungan tidak mengerti bagaimana status dana satu persen dan pembagian Rp 500 juta untuk masing-masing kelompok suku bangsa. Rumor tentang dua kemungkinan berkembang dalam masyarakat. Skenario pertama adalah jika dana satu persen itu adalah uang 'kerusuhan' atau uang 'tutup mulut' agar masyarakat tidak terus menerus protes. Jika demikian, maka yang berhak adalah suku bangsa Moni pimpinan Fidelis Zonggonau karena daialah pemimpin kerusuhan. Fidelis berhak menerimanya dan membagikannya kepada suku-suku bangsa lain yang ikut terlibat dalam kerusuhan tersebut.

Skenario kedua adalah jika dana itu merupakan kompensasi atau rekognisi hak ulayat, kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia, maka Amungme dan Kamoro lah yang berhak, karena kedua suku bangsa itulah pemilik hak ulayat tanah yang digunakan sebagai daerah pinjam pakai Freeport. Gunung Ertzberg dan Grasberg yang selama ini dikeruk tembaga dan emasnya adalah hak ulayat Amungme. Begitu pula dengan sungai dan daerah-daerah yang dilalui oleh jalan Freeport adalah daerah Amungme. Pelabuhan Amamapare, jalan-jalan yang menghubungkan pelabuhan itu dengan pusat penambangan, serta sungai-sungai dan dusun sagu yang tercemar oleh tahi tambang (*tailings*) adalah wilayah Kamoro (terutama Nawaripi dan Tipuka).

Skenario kedua dikhawatirkan oleh suku-suku bangsa non-Amungme karena itu berarti mereka tidak berhak menerima pembagian dana secara langsung—harus melalui Amungme dan Kamoro. Kelima suku bangsa itu, jika dipaksakan menerima dana, terutama pemimpinnya, takut dianggap merampas hak Amungme dan Kamoro. Dengan menerima dana dari Freeport yang statusnya sebagai recognisi atas hak ulayat amungme dan Kamoro dikhawatirkan menimbulkan kebencian Amungme terhadap mereka dan ini dengan mudah menyulut pertikaian (perang suku) antar kelompok suku bangsa.

Sementara itu, kalangan aktivis Amungme yang dimotori oleh LEMASA, mengkhawatirkan dua hal. Pertama, konflik antarsuku seperti dijelaskan di atas akan semakin meningkat. Kedua, penerimaan dana oleh suku-suku yang ada akan

21. Ellenberger, 1996, *The Impact of Damal World View on the Formation of Local Teology in Irian Jaya*, Desertasi Doktor UMI Dissertation service, Michigan.

22. Lihat J. Pouwer, *Enkele Aspecten van de Mimika-Cultuur*, Disertasi yang diterbitkan pada 1995. Lihat juga Coenen, J. OFM. 163. "Beberapa Aspek dari Kebudayaan Mimika yang Rohani". *Makalah tidak diterbitkan*.

digunakan oleh Freeport untuk kampanye kepada publik nasional dan internasional bahwa Freeport sudah memberikan rekognisi kepada masyarakat asli. Hal ini dinilai dapat memperlemah usaha LEMASA dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan membawa Freeport ke pengadilan di New Orleans Amerika Serikat.

Berbagai kontroversi yang berkaitan dengan status dana itu belum pernah tuntas, tetapi militer, Pemda dan Freeport, menggunakan berbagai cara agar uang Rp 500 juta bias segera diterima oleh masyarakat. Hingga pertengahan September 1996 sejumlah orang dari enam suku bangsa melalui yayasan masing-masing sudah menerima uang tersebut. Hanya satu suku bangsa yang masih menolak menerimanya, yaitu suku bangsa Mee. Jadi dari 3,5 milyar yang akan dijatahkan sudah terbagi 3 milyar. Sisanya 14 milyar akan dikelola PWT2 untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Freeport dan Pemda berusaha mengakhiri kontroversi dengan mengatakan bahwa dana satu persen yang berjumlah Rp 34,5 milyar bukanlah dana kerusuhan maupun dana rekognisi, melainkan dana pembangunan Irian Jaya (*Irian Jaya development fund*). Dengan penetapan status baru itu maka suku bangsa Mee kemudian menerima jatah Rp 500 juta dan program-program yang dibuat dengan dana satu persen²³. Dana satu persen sebagai "dana pembangunan Irian Jaya" bearti bahwa dana ini diperuntukkan pembangunan Papua secara umum, misalnya untuk beasiswa, bantuan social, pengembangan kesehatan masyarakat, dan lain-lain, yang tidak terbatas pada masyarakat di sekitar Timika saja. Dengan penjelasan ini diharapkan ke tujuh sukubangsa yang ada di Timika segera meminta sepenuhnya pembagian uang secara merata dan terkesan adil itu.

Tetapi sebenarnya keterbukaan peruntukkan dana pembangunan itu mengundang masalah baru. Masyarakat Irian Jaya dari berbagai kabupaten seperti Sorong, Biak, Fak-fak, Jayawijaya, dan lain-lain, segera bereaksi dengan mengatakan, "kalau begitu kita orang juga berhak!" Jauh sebelum status dana pembangunan dikukuhkan, telah tersebar di kalangan masyarakat pegunungan tengah bahwa di Timika akan selalu ada pembagian uang dari Freeport sejumlah 35 milyar setiap tahun untuk tujuh suku bangsa. Akibatnya, orang-orang yang merasa warga salah satu suku bangsa dari tujuh suku bangsa yang disebutkan akan segera berdatangan ke Timika. Masalah baru yakni in-migrasi dan urbanisasi ke Timika.

Di kalangan suku-suku pegunungan berkembang suatu situasi tegang dan saling mencurigai antar pemimpin, intra suku, dan antar suku bangsa. Di kalangan itu terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang mau menerima dana dan kelompok yang masih ragu atau menolak menerima dana. Sementara itu uang Rp 500 juta terdistribusikan karena tidak ada indikasi bahwa Freeport atau pemda atau militer

akan melakukan pendekatan atau dialog dengan pihak-pihak yang masih mempertanyakan status dan pengelolaan dana satu persen.

Polarisasi masing-masing suku-suku bangsa dalam dua pihak yang menolak dan menerima dana satu persen kian mengeras. Pihak yang menolak dimotori oleh aktivis LEMASA yang didukung oleh mayoritas Amungme dan sejumlah kepala suku yang sejalan gagasannya dengan LEMASA. Pihak yang menerima dimotori oleh Sersan Philipus Waker Babinsa Kwamki Lama dan Andreas Anggaibak²⁴ yang setelah pertemuan di Sheraton menjadi berbalik menerima dana satu persen. Konflik yang mengeras antar suku bangsa teruama terjadi antar kelompok Dani pimpinan Waker melawan kelompok Amungme dibawah pimpinan Tom Beanal dari LEMASA.

Dalam konflik ini tampak peran militer yang berpihak pada kelompok pro satu persen. Sersan Waker mengundang anggota-anggota militer dari suku bangsa Dani dan suku-suku lain yang pro satu persen bersatu menghadapi kelompok LEMASA. Perkelahian massal dua kelompok ini pernah terjadi dua kali di Kwamki Lama. Korban berjatuh dari kedua belah pihak. Benny Waker, adik Philipus Waker, tewas terbunuh dalam suatu tawuran. Seorang aktivis muda LEMASA Lukas Amisim juga menjadi korban dalam pertikaian itu.

Strategi pembagian dana satu persen merupakan taktik militer untuk memecah belah kekompakan di kalangan suku-suku pegunungan yang agresif, terbuka, dan pemberani. Persatuan di antara mereka di bawah LEMASA membahayakan kepentingan militer dan Freeport. Sasaran terpenting dari strategi ini adalah LEMASA. Disingkirkannya LEMASA sebagai konsekwensi logis penolakannya, memuluskan rekayasa untuk membuat LEMASA kehilangan legitimasi. Kooptasi atas Andreas Anggaibak, Gerardus Timang, dan pemuka Amungme lainnya adalah dalam rangka melemahkan LEMASA.

Keterlibatan militer dalam dinamika yayasan tujuh suku bangsa menghasilkan polarisasi di masing-masing kelompok suku bangsa. Hampir setiap suku bangsa yang termasuk dalam tujuh suku bangsa terdapat kutub yang pro dan kontra. Seluruh konflik yang muncul berkisar pada pro dan kontra satu persen. Pembicaraan dan diskusi yang lebih jauh dan mendalam tentang program-program pembangunan di masing-masing yayasan dapat dipastikan tidak berjalan. Sebagian dana digunakan untuk memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam kontroversi itu.

²³ Pengakuan Ketua Yayasan Mee, Ignatius Adi, dan "Kepala Suku" Mathias Gobay.

²⁴ Aser Wenda, seorang pimpinan Nol Naisorei di Kwamki Lama mengatakan, "Dulu semua orang itu tolaksatu persen dan mau ikut siap LEMASA. Tetapi pemerintah dan tentara menodong Andreas Anggaibak, Gerardus Timang, dan Leriur Katagame, yang semuanya bekas anggota OPM. Mereka diancam, jika menolak satu persen maka mereka akan mati. Jika ingin hidup mereka harus menerima satu persen. Dengan penerimaan orang itu maka sebagian orang suku-suku bangsa pendatang menjadi bimbang. Sebagian besar tetap ikut satu persen tetapi sebagian kecil lagi menerima satu persen". Wawancara di Timika, Juli 1997.

Dengan memainkan dana satu persen di kalangan suku-suku bangsa dihasilkan ketegangan antara mereka. Hal ini jelas menguntungkan militer. Selain karena kelompok suku-suku menjadi lemah, kesan rawan untuk Timika dan sekitarnya penting bagi eksistensi militer di sana. Dalam rangka memperkuat kontrolnya atas yayasan tujuh suku bangsa, militer melakukan intervensi dan penyusupan orang-orangnya dalam proses pembentukan dan pemilihan pemimpin-pemimpinnya. Taktik pertama adalah pemasangan prajurit dan intel-intel pembantu militer dari suku-suku bangsa bersangkutan untuk memimpin yayasan. Dengan ini kontrol mudah dilakukan dan dana yang mengalir ke yayasan bisa diambil sebagian untuk mereka. Taktik kedua adalah penempatan orang-orang yang memiliki rekor politik yang buruk dalam kaitan dengan keterlibatannya dengan OPM di masa lalu. Dengan cara ini tekanan dan kontrol menjadi lebih efektif.

Freeport sebagai proyek vital

Tidak lama setelah kerusuhan Maret 1996, diumumkan bahwa Freeport adalah proyek vital negara. Itu berarti bahwa militer segera hadir disana dalam jumlah yang lebih besar untuk "melindungi" keamanan dan kelangsungan usaha pertambangan Freeport. Dalam pengamatan peningkatan jumlah aparat keamanan baik polisi maupun militer sangatlah jelas. Bila kita berjalan dari kompleks karyawan Tembapapura ke Banti yang jaraknya tidak lebih daripada dua kilometer, kita akan melewati sekitar lima pos keamanan yang satu sama lain tidak berjauhan. Ada posko polisi sektor, Brimob, Kostrad, Koramil, dan yang terakhir Kostrad lagi. Dari posisi, terkesan bahwa situasi keamanan di sana sangat rawan.

Di dalam kompleks Tembapapura, kehadiran polisi dan militer tampak mencolok. Di sana-sini beberapa pasang aparat keamanan berjaga-jaga dengan dilengkapi senapan otomatis laras panjang. Penjagaan itu rupanya dilakukan di seluruh sudut. Ketika saya menyusup ke dalam dapur umum untuk menemui seorang narasumber Amungme, terlihat dua anggota Brimob ada di dalamnya sedang menenteng karung. Seorang karyawan mengatakan bahwa aparat itu baru saja mengambil berpotong-potong daging ayam dan sapi serta buah-buahan dan susu. Padahal makanan di sana disediakan hanya untuk karyawan. Tidak ada yang berani mencegah mereka.

Suasana sepanjang jalan dari Tembapapura ke Timika pun berubah setidaknya posko-posko militer menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sewaktu melakukan perjalanan, beberapa kali mobil yang kami tumpangi dihentikan untuk dicek. Peningkatan jumlah posko ini ternyata berdampak buruk bagi karyawan. Aparat seringkali memaksakan diri menumpang mobil meskipun mobil penuh. Padahal menurut *standard safety* yang berlaku di Freeport hal itu dilarang keras. Sanksi bagi pengemudinya sangat keras, pencabutan *licence*. Pernah suatu kali seorang karyawan menolak memberi tumpangan, ban mobilnya

ditembak dan pengemudinya dianiaya. Kasus-kasus semacam itu oleh manajemen Freeport biasanya tidak ditindaklanjuti.

Konflik antar kesatuanpun merebak. Paling sering tawuran adalah anggota kesatuan dari Kostrad dan Kopassus melawan Brimob yang tidak hanya terjadi di daerah-daerah terpencil tetapi juga di tengah keramaian. Perkelahian bermula dari antar individu, lalu biasanya diikuti oleh keterlibatan anggota-anggota kesatuan yang lain yang merasa solidier karena kawan satu kesatuannya dianiaya oleh anggota kesatuan lain. Tembakan menembak sebagai teror atas satu kesatuan terhadap kesatuan yang lain adalah hal biasa di Timika. Misalnya, suatu kali ketika serombongan Brimob dalam satu bus yang hendak mengakhiri masa dinas menuju bandara dan melewati markas Polisi Militer, mereka menembaki atap markas sebagai "salam perpisahan".

Deretan contoh peningkatan kehadiran aparat keamanan dan akibat yang ditimbulkannya bisa diperpanjang hingga berhalaman-halaman. Dari contoh-contoh di atas kehadiran militer dan polisi yang seringkali disebut sebagai "aparat keamanan" justru mengakibatkan rasa "tidak aman" bagi karyawan Freeport, apalagi bagi rakyat dan penduduk asli Timika dan pegunungan sekitarnya.

Pendeknya, kerusuhan Maret 1996 dan pemberian dana satu persen menjadi kendaraan yang strategis dan menguntungkan bagi militer, yang kemudian mengajak polisi, untuk menjadikan Timika-Tembapapura dan sekitarnya menjadi ajang untuk "proyek keamanan"²⁵. Kehadiran aparat yang begitu drastic lonjakannya dan membiakkan posko-posko keamanan terkait dengan sumber kegiatan yang menghasilkan uang yang besar bagi para pemimpin militer dan kepolisian.

Proyek keamanan di Freeport tampaknya menjadi target terpenting dari rangkaian kerusuhan Maret, Dana Satu Persen, hingga penghancuran kekuatan LEMASA. Terlepas dari kebenaran informasi nilai proyek yang mendekati seratus juta dollar AS, secara kasat mata dapat diduga bahwa proyek keamanan ini membutuhkan dana besar. Seluruh perwira tinggal di hotel, mulai dari Hotel Serayu hingga Sheraton Inn. Posko-posko asrama baru, kendaraan baru, pangkalan baru, dan jumlah anggota yang besar, membutuhkan dana yang besar. Transportasi dan logistik yang diperlukan pasukan empat angkatan di sana sangat besar pula. Nilai ekonomi dan politik proyek keamanan ini pastilah penting di mata para petinggi militer.

Kesimpulan

Dari studi kasus peran militer dalam konflik Freeport melawan Amungme, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang

²⁵ Dalam komunikasi pribadi dengan seorang staf Freeport, saya mendapatkan informasi bahwa terdapat kesepakatan Panglima Militer dan James Moffet untuk membuat proyek yang diberi nama *Hectagon Project* yang bernilai puluhan juta dollar AS.

tampaknya sporadis, namun sebenarnya terkait dan berhulu dari satu paradigma politik Orde Baru yang menempatkan Dwi Fungsi militer sebagai salah satu pilar utama kekuasaannya.

Pertama, dalam menghadapi perlawanan rakyat di tingkat lokal militer selalu menggunakan stigma “gerakan pengacau keamanan” atau dalam konteks papua digunakan “Organisasi Papua Merdeka”. Sedangkan untuk perlawanan kelompok-kelompok prodemokrasi, terutama NGO-NGO Jakarta terlibat di dalamnya digunakan stigma “merongrong kewibawaan pemerintah yang sah dan menghambat pembangunan”.

Kedua, militer selalu berpretensi sebagai kelompok yang paling bertanggung-jawab dalam kelangsungan “pembangunan nasional”. Katakanlah pengaturan dana satu persen dan program-program PWT2 sebagai wujud pembangunan di Timika, maka dapat dikatakan bahwa “pembangunan” dalam konteks ini berarti “penghambur-hamburan dana rakyat dan pemicu disintegrasi social di kalangan rakyat setempat”.

Ketiga, militer sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia memiliki kepentingan politik dan ekonomi di dalam dirinya, sehingga di dalam menghadapi konflik antara dua pihak, perusahaan lawan militer, militer selalu berpihak pada kepentingan perusahaan karena darinya militer memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi.

Keempat, kesan umum—dalam konflik Freeport-Amungme, Freeport diuntungkan oleh keterlibatan militer tidak sepenuhnya tepat. Freeport lebih banyak dirugikan karena intervensi militer di dalamnya membuat Freeport “terlibat” dalam tuduhan pelanggaran HAM 1995, membuat keresahan di kalangan karyawannya, citra yang semakin buruk di tingkat nasional dan internasional, dan biaya keamanan yang kian mahal.

Kelima, militer memiliki kemampuan untuk menciptakan scenario yang canggih dalam menciptakan opini publik tertentu yang bahkan mampu membuat berbagai pihak terjebak dalam kesan politik yang dibangun militer, bahkan NGO-NGO nasional seperti WALHI dan ELSAM pun terjebak di dalamnya. Ini terlihat dari Kerusuhan Maret 1996, pertemuan di Hotel Sheraton Timika, dan keputusan peluncuran dana satu persen.

Keenam, militer dalam melemahkan perlawanan rakyat menggunakan taktik *divide and rule*, seperti yang tampak pada bagaimana kelompok suku-suku bangsa di Timika dibuat saling berkonflik memperebutkan dana satu persen. Di sini dana satu persen dan identitas kesukubangsaan diperalat oleh militer untuk memperlemah persatuan kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di Timika. Pada tingkat tertentu, taktik ini dapat dikatakan berhasil.

Ketujuh, dalam kasus Freeport-amungme, militer dihadapkan pada suatu kekuatan lokal yang solid, yakni LEMASA yang didukung NGO-NGO bertaraf nasional seperti YPMD, WALHI, ELSAM, dan secara diam-diam dari sejumlah aktivis Gereja Katolik. Dalam konteks ini, militer dapat

dikatakan gagal. LEMASA pada awalnya dibuat disintegratif dan mengalami polrisasi. Tetapi pada perkembangan selanjutnya, LEMASA semakin solid dan pada akhirnya mampu memaksa Freeport (dengan bantuan sejumlah organisasi nasional dan internasional) duduk disatu meja bernegosiasi dan mengambil alih dana satu persen di dalam kontrol pengelolaannya (bagian ini tidak diuraikan dalam makalah).

Dalam *term of reference* yang ditulis oleh Prof.Dr. M Yunus Melalatoa dan Dr. Amri Marzali dinyatakan suatu harapan bahwa dari studi ini,

“...diharapkan dapat ditarik pelajaran yang berharga untuk tidak mengulang kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kajian juga diharapkan dapat menghasilkan panduan tentang wujud pranata, perilaku, dan ‘budaya penguasa’ yang bagaimanakah yang ‘ideal’ bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di masa depan”.

Secara Politik dwifungsi ABRI di tingkat nasional sudah diatangani dengan baik oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid. Peran sosial politik berkurang drastis dan cenderung menghilang. Namun itu tidak berarti bahwa budaya militer Orde Baru hilang begitu saja di tengah masyarakat. Fenomena yang masih menonjol di tengah masyarakat adalah kecenderungan kekerasan oleh kelompok masyarakat dan terbentuknya berbagai satgas oleh partai-partai politik maupun oleh kelompok pendukung gerakan papua merdeka. Jika kita amati keadaan sekarang di Papua, masyarakat yang pro kemerdekaan pun dalam tindak-tanduknya banyak membuat peniruan-peniruan terhadap pola-pola militeristik Orde Baru.

Hal penting terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, selain pelajaran tentang pengalaman militerisme, adalah pentingnya pemupukan kekuatan-kekuatan masyarakat lokal dalam menghadapi represi di pihak *state* yang biasanya ditopang oleh kekuatan militer. LEMASA sebagai pranata lokal adalah contoh bagaimana sebenarnya kekuatan lokal dapat dibangun untuk menumbuhkan rasa percaya diri, solidaritas, kepemimpinan, keterwakilan dalam kepentingan dan aspirasi dalam hubungannya dengan otoritas yang lebih tinggi seperti negara. Pranata lokal semacam ini bisa diduplikasi di banyak tempat di Papua.

Pranata lokal yang kuat dan aspiratif adalah mediator penting dalam berbagai konflik. Di dalamnya orang memiliki kesempatan untuk membaca dengan baik situasi yang dihadapinya dan mampu merumuskan secara bersama-sama apa yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan tumbuhnya mekanisme organisasi semacam ini suatu kelompok suku bangsa di wilayah adatnya dapat menghadapi berbagai kekuatan di luarnya dengan lebih sistematis. Dengan adanya pranata lokal yang tangguh eksploitasi dan manipulasi yang dilakukan oleh pihak luar atau dari dalam dapat diselesaikan tanpa kekerasan.